

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN NELAYAN DI DESA LANTUNG KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Oleh :

REGINA PAMELA SAROINSONG
Email: Gheeza_girlz@yahoo.co.id

Abstract

This study aimed to look at how far of the government's role in tackling poverty in the fishing village of Lantung at Wori districts of North Minahasa regency . From a theoretical perspektive , poverty is caused by lifestyle , the lifestyle of a consumer society , lack of human resources , as well as government policies that are not appropriate . Particularly because managemennt program are running in top- down model .

This study used a descriptive analysis approach , the respondents were poor fishermen as many as 40 people. The result showed that the strategies undertaken by government in tackling poverty in the fishing village of Lantung at Wori districts of North Minahasa regency needs. But the programs that do not be sustainable. Besides other issues that are also pushing into government programs are untaken low education levels , natural factors , the lack of supporting infrastructure , as well ass comsumptive lifestyle.

From this study , it is recommended that the poverty alleviation program for the fishermen in the Lantung village at district of Wori North Minahasa regency must be done in a bottom – up , which is designed from the ground to fit the needs and abilities of the poor fishermen . In addition it is necessary for capital relief package for the provision of infrastucture, diversification of farming activities , and open a savings package fishermen.

Key Word : Policy , Poverty , Bottom – Up , Top-Down .

Latar Belakang Pemikiran

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi karena cukup beragam sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Untuk menyelesaikannya harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi mereka. Dari masalah kemiskinan nelayan sebagaimana dikemukakan di atas juga dapat dijumpai pada masyarakat nelayan khususnya di wilayah Kecamatan Wori khususnya di Desa Lantung.

Di Desa lantung, berbagai permasalahan sebagaimana disebutkan di atas juga telah ditemukan permasalahan yang kompleks yang berkaitan dengan kemiskinan nelayan, antara lain bahwa kebijakan pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat nelayan, belum dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paket pemberian modal usaha seringkali tidak kena sasaran disebabkan karena program tersebut hanya bersifat sementara, karena sasaran program hanya mengurangi beban penduduk dari garis kemiskinan, sementara yang diharapkan adalah modal sosial dalam kesinambungan hidup mereka hingga mereka mampu mandiri, minimnya tingkat pendapatan nelayan yang disebabkan oleh akses produksi, peralatan masih bersifat sederhana, jangkauan usaha terbatas karena dipengaruhi oleh sarana dan prasarana tangkapan yang relatif kecil/minim, akses pasar masih dikuasai oleh para tengkulak yang disebabkan oleh besarnya ketergantungan nelayan, Sikap mental nelayan yang konsumtif, membuat mereka tak mampu meningkatkan usahanya. Selain itu dipengaruhi pula oleh latar belakang pendidikan rendah serta faktor sosial budaya masyarakat terutama yang berkaitan dengan tradisi menangkap ikan melalui warisan nenek moyang mereka, minimnya masyarakat nelayan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan peningkatan usaha.

Oleh karena itu latar belakang penelitian ini lebih menitikberatkan pada : "*Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*".

Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat yakni sejauh mana Peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi Kemiskinan, Usaha Apa Yang Dilakukan Pemerintah, dan Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat Nelayan di desa Lantung ?

Manfaat dan Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.

Sedangkan tujuan penelitian ialah untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan:

- Mengetahui usaha apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam kaitan dengan program Pemberdayaan bagi masyarakat Nelayan Miskin
- Faktor-faktor apa yang berkaitan dengan kemiskinan masyarakat Nelayan

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemerintah Desa

Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. (Amandemen UU 12 Bab I Pasal 1 ayat 12 tentang Pemerintahan Daerah tahun 2008).

J.B.A.F mayor Polak (1976) mengemukakan bahwa desa mempunyai tiga ciri khas yaitu sifat kekeluargaan diantara penduduk, sifat kolektif dalam pembagian tanah, sifat kesatuan ekonomis yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri.

Pembahasan mengenai Desa dapat ditinjau dari segi pemerintahan (ketatanegaraan) dan segi geografi. Dari segi pemerintahan istilah desa atau dengan nama aslinya yang setingkat, merupakan kesatuan masyarakat hukum bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1975 :5) desa juga merupakan suatu kesatuan hukum meliputi suatu masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan berhak mengadakan pemerintahan sendiri. Apa yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum. Maksudnya suatu masyarakat yang perilaku dan kehidupannya diatur dan diurus menurut hukum tertentu. Masyarakat hukum adat berarti perilaku dan kehidupan masyarakat itu diatur oleh adat. Masyarakat yang terikat adat berdasarkan pertalian darah atau kekerabatan disebut masyarakat genealogis, sedangkan bila masyarakat tersebut terikat daerah tertentu yang disebut masyarakat territorial.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas,2002). Dimensi utama kemiskinan adalah politik, social budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi. Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit akibat kekurangan air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas .(World Bank).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena penulis ingin mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sosial yang berhubungan dengan Peran Pemerintah Desa dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di Desa Lantung.

Jenis penelitian ini berpegang pada pendapat Masri Singarimbun dan effendi (2003: 4 – 5) bahwa Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, melalui pengembangan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Jenis Data dan Sumber Data

Data diambil dalam dua bentuk yaitu melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil responden yang ditemui di lokasi sedangkan cara pengumpulan data sekunder yaitu melalui data statistik desa dan data Monografi desa.

Teknik Pengumpulan Data

Melalui wawancara secara mendalam untuk memperoleh penjelasan secara rinci bagaimana peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan nelayan di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.

Serta melalui observasi yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati secara langsung.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Penelitian data dapat dilakukan dengan prinsip validitas dan obyektivitas dengan cara mengkategorikan data
- 2). Pengolahan dan Analisis Data yang dilakukan dengan cara :
 - a. Data yang bersifat Kualitatif akan dipisah-pisahkan menurut Kategori, kemudian dikuantifikasikan dihitung persentasenya serta ditafsirkan dengan analisis kualitatif,
 - b. Data yang bersifat kuantitatif akan diproses dengan cara pengklasifikasian dan dihitung persentasenya lalu dilakukan penafsiran dalam bentuk deskriptif sebagaimana lazimnya dalam penelitian deskriptif.
 - c. Interpretasi hasil analisis data akan dilakukan sesuai dengan pokok bahasan dari masing-masing konsep dan variabel yang akan dibahas,
 - d. Setelah dilakukan proses pembahasan dan analisis data maka langkah terakhir penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil kajian penelitian.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan,

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infra struktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Untuk melihat bagaimana karakteristik masyarakat nelayan khususnya di Desa Lantung maka akan dapat dibahas sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan masyarakat nelayan.

Masalah pendidikan bagi masyarakat nelayan adalah merupakan masalah yang pelik yang lazim dihadapi oleh masyarakat nelayan secara umum. Rendahnya tingkat pendidikan bagi masyarakat nelayan akan dapat berdampak pada kualitas hidup bagi masyarakat nelayan antara lain berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, serta tingkat kesejahteraan keluarga nelayan. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah tentu akan berdampak pada aktivitas bagi masyarakat nelayan. Secara umum nelayan yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah adalah terdapat pada nelayan yang miskin.

Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat dihasilkan oleh para nelayan, dalam hal ini teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya menggunakan cara yang tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan nelayan terhadap teknologi.

Dukungan pemerintah dan pihak lain sangat dibutuhkan, karena kelemahan utama nelayan Indonesia di banding nelayan bangsa lain adalah masalah pemanfaatan teknologi, akses informasi mengenai titik-titik keberadaan ikan tidak dimiliki oleh nelayan, sehingga jumlah tangkapan nelayan selalu terbatas. Nelayan perlu diedukasi untuk mampu memahami sistem teknologi satelit atau GPS, setidaknya walaupun tidak mampu menggunakan teknologinya, nelayan dibukakan akses informasinya, baik dari pihak DKP, BMG maupun syahbandar, sebagai pengelola kegiatan nelayan di tingkat lokal. Selain itu dalam peningkatan kualitas ikan, dukungan dari pengusaha atau pihak akademik mengenai teknologi pengawetan, pengemasan harus diberikan, agar harga ikan yang nelayan jual tidak mengalami kejatuhan.

Dukungan akan peningkatan pendidikan tidak semata kepada nelayan sebagai kepala keluarga, melainkan nelayan dalam konteks keluarga. Keterbatasan pengetahuan terkadang terjadi karena sifatnya turun temurun, dimana orang tua tidak mengharuskan anaknya untuk melanjutkan sekolah. Hal ini memang harus diakui karena juga untuk meningkatkan pendidikan bagi nelayan juga tergantung pada tingkat pendapatan yang diterima, tak mengherankan kalau nelayan yang mempunyai anak sekolah sudah berhenti mulai dari SD bahkan masih duduk di kelas satu dan kelas dua SD karena mereka kurang memiliki pendapatan. Keterbatasan keluarga nelayan dalam mengakses

pendidikan dasar yang bersifat formal maupun pendidikan lain yang sifatnya informal harus ditingkatkan, pemangku kepentingan harus memprioritaskan akan hal ini dengan membangun fasilitas pendidikan di dekat pemukiman nelayan, membangun akses prasarana, seperti jalan. Selain memberikan variasi pilihan pendidikan baik formal maupun informal, hingga penyelenggaraan setara paket A, B dan C. Jika kondisi pendidikan pada anak nelayan jauh lebih baik, minimal memenuhi pendidikan dasar bahkan menengah, akan memudahkan nelayan tersebut dalam memanfaatkan teknologi maupun akses pengetahuan lainnya akan dapat diwujudkan. Jadi tingkat pendidikan juga akan sangat mempengaruhi taraf hidup bagi masyarakat nelayan. Semakin baik tingkat pendidikan nelayan maka akan semakin menambah wawasan mereka dalam berusaha terutama dalam meningkatkan taraf hidupnya.

2. Pola Hidup Masyarakat Nelayan.

Kita ketahui bahwa masyarakat nelayan secara umum memiliki pola hidup yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Hal ini ditandai dengan minimnya akses produksi, minimnya permodalan, kekurangan fasilitas dalam hal melaut, serta dipengaruhi oleh faktor sosial budaya serta tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Berkaitan dengan diversifikasi pekerjaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pemangku kepentingan diharapkan mampu mencari potensi baik kewilayahan, maupun keterampilan masyarakat nelayan. Hal ini perlu, agar ada diversifikasi yang lebih menguntungkan, apakah melalui upaya pengembangan pariwisata setempat, pengolahan hasil tangkapan laut menjadi makanan khas, hingga upaya budidaya ikan. Potensi budidaya ikan di desa ini juga cukup berpeluang untuk dikembangkan karena dengan tersedianya lahan di wilayah pesisir seperti ditanami dengan budidaya rumput laut, maupun ikan di keramba. Selain hal yang disampaikan di atas diperlukan untuk membangun jejaring diantara pemangku kepentingan berdasarkan kapasitasnya. Misalnya LSM dengan memberikan pendampingan dan pelatihan, pemerintah memberikan dukungan perizinan dan fasilitas dan pengusaha memberikan bantuan modal. Dengan konsep ini, diharapkan kondisi paceklik, tidak akan terlalu besar dampaknya bagi masyarakat nelayan karena sudah terbentuk alternatif pekerjaan yang sama-sama menguntungkan. Apabila pola hidup masyarakat nelayan tidak dapat diperbaiki maka kemungkinan besar nasib mereka berada dalam kungkungan kemiskinan. Oleh karena itu perbaikan pola hidup bagi masyarakat nelayan dilakukan seefektif mungkin.

3. Kondisi Alam

Permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan karena hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle*) setiap tahunnya. Makanya tidak ada yang bisa dilakukan dalam menghadapi kondisi alam, karena alam tidak akan bisa dilawan. Hal yang bisa dilakukan dalam menghadapinya adalah perlunya masyarakat nelayan memiliki penguasaan aspek informasi dalam hal cuaca dan lokasi. Nelayan di

berbagai wilayah membutuhkan dukungan yang konkrit dari berbagai pihak mengenai prediksi cuaca dan di lokasi mana kemungkinan akan terjadi cuaca ekstrim, sehingga resiko di laut dapat dihindari, dan alternatif wilayah tangkapan yang relatif aman didapatkan. Perlunya kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan pihak Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) mengenai perkiraan cuaca dalam jangka waktu yang bersifat menengah maupun panjang, sehingga nelayan di masing-masing daerah sudah bisa memprediksikan kondisi cuaca. Dengan demikian waktu tangkap dan lokasi tangkap sudah bisa nelayan rencanakan sebelum melaut. Jika kondisi tersebut terwujud, nelayan bisa menentukan waktu, kapan mereka harus optimal menangkap ikan, harus menabung untuk persiapan paceklik, dan kapan mereka harus merawat perlengkapan tangkap ikan disaat memanfaatkan kondisi cuaca paceklik. Sosialisasi mengenai perkembangan cuaca beserta prediksinya dapat menggunakan pertemuan kelompok nelayan. Pemberian informasi mengenai perkembangan cuaca beserta dasar prediksinya merupakan asupan berharga bagi masyarakat nelayan, karena akan menjadi keuntungan bagi nelayan disamping mereka memahami ilmu kebaharian tradisional yang sifatnya turun temurun yang terus dilestarikan, juga pemahaman dasar mengenai kondisi cuaca berdasarkan informasi berdasarkan pemanfaatan akan teknologi. Terlepas dari kondisi alam yang terjadi di wilayah penelitian menunjukan bahwa akses untuk penguasaan sumberdaya dapat dikatakan masih sangat terbatas walaupun ada berbagai pengalaman yang mereka miliki sejak dari turun temurun. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh jangkauan usaha mereka seperti masih menggunakan dayung sehingga akan mempengaruhi hasil tangkapan mereka.

4. Kondisi Alat Tangkap dan Pemasaran hasil tangkapan

Dalam melaksanakan aktivitasnya terutama dalam hal melaut secara umum masih menggunakan alat tangkap secara tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak turun-temurun. Hal ini ditandai dengan alat transportasi dengan menggunakan perahu londe dengan bantuan alat dayung, kail yang digunakan untuk memancing sangat sedikit, serta masih mempertahankan tradisi dalam menangkap ikan. Dengan keterbatasan peralatan yang sangat sederhana tersebut membuat nelayan memperoleh hasil tangkapan sangat sedikit bahkan seringkali tidak cukup memenuhi kebutuhan. Masalah peralatan yang sederhana tentunya akan mempengaruhi jangkauan untuk mencari ikan, oleh karena itu masyarakat nelayan apabila mencari ikan yang lebih banyak mereka tak mampu bersaing dengan nelayan-nelayan yang memiliki fasilitas yang memadai, akibatnya hasil produksi yang didapat sangat sedikit. Kemudian hasil panen yang didapat tidak dijual secara langsung di tempat pelalangan melainkan dijual kepada masyarakat yang terdekat. Seringkali kalau penjualan ikan tidak dijual ke tempat pelalangan ikan (TPI) maka secara langsung harga ikan akan turun, sedangkan kalau dijual melalui tempat pelelangan ikan sudah tentu akan mendapatkan harga yang layak.

Sudah barang tentu tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Kondisi ini yang selalu mengakibatkan nelayan tidak pernah untung, keterbatasan infrastruktur

menjadikan nelayan merugi, tidak seimbangnya antara biaya yang dikeluarkan untuk melaut, dengan keuntungan hasil jual, karena harga dipermainkan oleh pihak tengkulak.

Upaya yang mungkin dilakukan agar nelayan tidak terjatuh lingkaran tengkulak adalah dengan mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikro dan koperasi yang memihak nelayan, selain itu perlu adanya upaya membangun usaha bersama, seperti melalui pemilikan sarana-sarana penangkapan dan pemasaran secara kolektif. Selain itu kebudayaan nelayan yang berbahaya namun terabaikan adalah terjalinnya relasi sosial ekonomi yang sifatnya eksploitatif dengan pemilik perahu dan pedagang perantara (tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan. Kondisi tersebut bisa diperbaiki dengan mengurangi beban utang piutang yang kompleks para nelayan kepada pemilik perahu dan tengkulak dengan mencari alternatif keuangan mikro. Harus adanya upaya dalam memperbaiki norma sistem bagi hasil dalam organisasi penangkapan, sehingga tidak merugikan nelayan. Selain itu perlu mengoptimalkan peran lembaga ekonomi lokal, seperti KUD Mina. Disisi lain rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup, upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemilikan lebih dari satu jenis alat tangkap, agar bisa menangkap sepanjang musim, mengembangkan diversifikasi usaha berbasis bahan baku perikanan atau hasil budidaya perairan, seperti rumput laut, memperluas kesempatan kerja sektor *off fishing* dan melakukan transmigrasi nelayan pada wilayah lain yang masih memiliki potensi kelautan.

Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua nelayan memiliki perahu sendiri. Nelayan yang tidak mempunyai modal untuk membeli perahu, terpaksa meminjam uang kepada tengkulak. Pada umumnya para tengkulak (patron) memberikan pinjaman kalau hasil tangkapan nelayan (klien) minim. Ketergantungan nelayan pada tengkulak berawal dari utang/pinjaman, dan biasanya dilakukan pada saat paceklik atau memperbaiki kerusakan alat tangkap seperti jaring dan mengganti tali kajar. Meskipun demikian, ada juga pihak yang menilai bahwa keberadaan para tengkulak tersebut justru menolong nelayan. Kondisi ini terjadi karena negara tidak mampu memberikan pinjaman lunak, dan walaupun ada bank, mereka juga tidak bisa mengaksesnya karena alat tangkap sebagai faktor produksi tidak bisa dijadikan agunan. Dalam perspektif struktural kemiskinan nelayan tidak hanya disebabkan hubungan patron-klien yang menimbulkan jeratan utang dan mengarah pada bentuk eksploitasi. Tetapi kemiskinan nelayan juga terjadi karena keterbatasan akses nelayan terhadap hak penguasaan sumberdaya perikanan. Penguasaan atas sumberdaya perikanan selama ini lebih banyak dinikmati oleh kolaborasi pemilik modal dan birokrat. Sebagai fakta adalah masih beroperasinya pukat harimau (*trawl*) di seluruh perairan Indonesia yang berakibat pada penyerobotan terhadap wilayah tangkap nelayan tradisional (*traditional fishing ground*). Bahkan adanya musim-musim tertentu dimana ikan jenis tertentu banyak dan sedikit menggambarkan bahwa kehidupan mereka tergantung pada rejeki laut. Dalam satu daerah dimana terdapat desa-desa pesisir juga memiliki perbedaan dalam tingkat kesurplusan sumberdaya perikanan. Namun berdasarkan pandangan nelayan (perspektif *emic*), kuatnya pola patron-klien di masyarakat nelayan disebabkan oleh kegiatan perikanan yang penuh resiko dan ketidakpastian sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bergantung pada pemilik modal (patron). Dari hal tersebut, bisa dibayangkan apa yang akan diterima para nelayan dengan sistem yang demikian,

sehingga sangatlah wajar jika kemiskinan menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan mereka. Namun apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pola hidup dari cara menangkap ikan sudah lebih baik, karena sebagian sudah mulai beralih dari sistem dayung ke mesin tempel seperti ketinting, maupun motor tempel, namun baru sedikit yang dapat memanfaatkan alat tangkapan tersebut disebabkan karena berkaitan dengan pendapatan nelayan.

Dalam konteks Negara berkembang seperti Indonesia, program penanggulangan kemiskinan masih merupakan salah satu program pemerintah bahkan masih mendapatkan prioritas. Dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan terutama krisis global yang masih melanda saat ini akan membawa dampak yang semakin berat pada kehidupan masyarakat lapisan bawah dan keluarga miskin, sehingga semakin sulit untuk mengentaskan kemiskinan dari berbagai permasalahan kemiskinan.

Walaupun pemerintah sudah berupaya mengurangi beban penduduk dari kemiskinan namun kemiskinan tetap masih menjadi program/prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Sebab diakui bersama bahwa program penanggulangan kemiskinan di suatu daerah tidaklah sama dengan program yang dilaksanakan di daerah lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara khususnya Dinas Perikanan sudah berupaya melaksanakan pembangunan Daerah terutama melalui penyediaan Infra Struktur. Kemajuan pembangunan melalui infra struktur atau pembangunan fisik belum menjadi jaminan bahwa pemerintah akan mampu mengurangi beban penduduk/masyarakat nelayan dari tingkat kemiskinan. Data kemiskinan di Kabupaten Minahasa Utara yaitu 10.12 %. Kemajuan pesat yang dicapai melalui pembangunan daerah dapat dilihat semakin tumbuhnya sentra-sentra ekonomi melalui kawasan pembangunan, terutama prioritas untuk kawasan investasi yang menggerakkan aktifitas jasa, perdagangan.

Nampaknya dengan melihat struktur perekonomian maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang dilihat dari hasil PDRB, yang begitu membaik dengan prioritas pembangunan fisik, tidak akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian penduduk khususnya masyarakat nelayan miskin akan mengalami peningkatan terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Buktinya sampai saat ini masih banyak masyarakat nelayan miskin yang masih membutuhkan berbagai kebijakan serta jalan keluar dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dari berbagai alasan yang dikaji di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi tingkat kemiskinan bagi masyarakat nelayan khususnya di Desa Lantung antara lain: Kurangnya kesempatan kerja, Rendahnya Tingkat Pendidikan, Rendahnya Tingkat Pendapatan, Kurangnya ketrampilan dan keahlian masyarakat nelayan miskin dalam mengembangkan kewirausahaan, minimnya permodalan, dan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat nelayan

Maka pemerintah desa mempunyai peran dalam memotivasi masyarakat nelayan karena tanpa adanya peran dari pemerintah untuk menggerakkannya maka masyarakat nelayan tidak akan dapat berbuat banyak karena fasilitas yang tersedia biasanya lebih besar dari pemerintah ketimbang dari masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini secara faktual belum dapat mengangkat tingkat kehidupan dan taraf hidup bagi masyarakat nelayan. Program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terhadap masyarakat nelayan hanyalah bersifat sementara dalam arti hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sementara program-program secara berkesinambungan belum dapat terealisasi.
2. Berbagai karakteristik yang turut mempengaruhi masalah kemiskinan bagi masyarakat nelayan antara lain disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dimana berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat nelayan memiliki latar belakang pendidikan SLTP. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah tentu akan berdampak pada aktivitas bagi masyarakat nelayan. Secara umum nelayan yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah adalah terdapat pada nelayan yang miskin. Pola hidup masyarakat nelayan secara umum masih bersifat tradisional, hal ini dibuktikan dengan akses dalam berusaha masih menggunakan teknologi tradisional seperti menggunakan dayung, serta masih tergantung pada musim, kawanan ikan serta tradisi dalam melaut yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.
3. Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle*) setiap tahunnya.
4. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan nelayan antara lain : minimnya ketrampilan nelayan dalam penguasaan peralatan, kurangnya memperoleh permodalan, belum tersedianya lembaga yang menampung dan menghimpun masyarakat nelayan dalam memperoleh wawasan dan pengetahuan terhadap bidang perikanan, sikap mental nelayan, pola hidup konsumtif serta kurangnya perhatian pemerintah khususnya pemerintah desa dalam memberikan motivasi kepada masyarakat nelayan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka pemerintah Desa harus memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Dilihat dari segi teknologi yang digunakan masyarakat nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Melalui kesempatan ini diperlukan upaya meningkatkan pendapatan melalui perbaikan teknologi, yakni mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran.

2. Perlunya pemberian bantuan berupa paket modal untuk pembelian peralatan seperti alat pendingin antara lain *coolbooks* serta alat pancing yang lebih canggih serta usaha motorisasi melalui paket kredit ringan serta perlu mengevaluasi setiap nelayan yang layak diberikan permodalan.
3. Hendaknya pemerintah desa lebih berperan aktif dalam memberikan motivasi seperti menggalakkan kegiatan usaha melalui diversifikasi budidaya, karena dengan kegiatan budidaya akan dapat direalisasikan tingkat produktivitas serta pendapatan bagi masyarakat nelayan.
4. Perlunya merubah pola kehidupan nelayan. Hal ini terkait dengan pola pikir dan kebiasaan. Pola hidup konsumtif harus dirubah agar nelayan tidak terpuruk ekonominya saat paceklik. Selain itu membiasakan budaya menabung supaya tidak terjerat kepada rentenir.
5. Perlunya sebuah kebijakan sosial dari pemerintah yang berisikan program yang memihak nelayan. Kebijakan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan harus bersifat *bottom up* sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat nelayan. Kebijakan yang lahir berdasarkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat nelayan, bukan lagi menjadikan nelayan sebagai objek program, melainkan sebagai subjek. Selain itu penguatan dalam hal hukum terkait zona tangkap, penguatan armada patroli laut, dan pengaturan alat tangkap yang tidak mengeksploitasi kekayaan laut dan ramah lingkungan, serta perlunya hak-hak yang diberikan kepada masyarakat nelayan dalam mengelola laut dan wilayah pesisir tanpa dibatasi dengan UU ataupun dalam bentuk hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Tessa . F. "*Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan Kemiskinan Aspek Sosial Budaya*". Draft Laporan Final Hibah Multidisiplin UI. 2009.
- Chamber Robert, 1980, *Rural Poverty Unpercelved, Problem an Remedies*, World Bank , Staf Working Paper No. 400 New York.
- ,1981, *Pembangunan Desa*,LP3ES Jakarta
- Bintarto. R. 1985, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, CV Rajawali Jakarta.
- Dick-Read, Robert. "*Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*". Bandung: Mizan 2008
- Fadel Muhamad 2009, *Kertas Kerja Kementrian Perikanan dan Ilmu kelautan*
- Handayaniingrat Soerwarno, 1982, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Sosial*, CV. Haji Masaagung, Jakarta
- H.A.W. Widjaya, 2008, *Pemerintahan Desa*, Penerbit Pradnya paramita Jakarta.
- Joko Siswanto, 1985, *Pengantar Administrasi Pemerintahan Desa*, CV Rajawali Jakarta.
- J.B.A.F. Mayor Polak, *Sosiologi suatu pengantar ringkas*, Blna Ilmu Jakarta.
- Kartasasmita Ginandjar , 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat, (Memadukan Pertumbuhan dan Perencanaan)*, Jakarta, PT. Pustaka Sidesindo
- Kusnadi, 2005 *Akar Kemiskinan Nelayan*". Yogyakarta. LKIS. 2002
- Mariun, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, CV Arya Duta.

- Moleong Lexy. L.J. 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rosdakarya Bandung.
- Mubyarto, *Petani Desa dan kemiskinan* BPFE Yokyakarta.
- Nasikun 2003, *Paradigma Pembangunan di Indonesia*, LP3ES.
- Ndraha Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat mempersiapkan masyarakat tinggal landas*, Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Nurmanaf, 1978, *Program Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan penduduk di Indonesia*, PT Sedar Melati.
- Owin Jamasi, 2005, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Sales Rafael, 1984, *Kemiskinan Nelayan dan berbagai masalah yang mempengaruhinya*, PT Gramedia Jakarta.
- Sudarwati, 2007, *Lingkaran kemiskinan nelayan*, Penerbit Pratnya Paramita Jakarta.
- Suharto, Edi. *"Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial"*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan public*, Alfabeta, Bandung, 2007
- Sugiyono, 2002, *Metodologi Penelitian Sosial*, Afbeta Bandung.
- Suparyogo, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pradnya Paramita.
- Solihin, Akhmad. *"Musim Paceklik Nelayan dan Jaminan Sosial"*.
- Sudarwati, . *"Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Nelayan"*. Suara Merdeka, 13 Desember 2007.
- _____.2006, *"Separuh Penduduk Masih Rentan Menjadi Miskin"*, Kompas, 8 Desember.
- Soetrisno Lukman, 1997, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*, , Kanisius Yokyakarta.
- Syaifuddin Asep, 2003, *Penanggulangan kemiskinan*, CV Sinar karya Jakarta.
- Levitan Sar A 1976, *Problem in Ald or the Poor*, The John Hopkins Univeersity Press, Baltimore
- Sackrey Charles, 1973, *The Political economy of Urban poverty* W.W. norton and Company, New York.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Nasional.

Sumber-sumber lain :

- BPS, 2008 pada tanggal 6 Juli 2011
- APBN tahun 2011
- UU No. 12 tahun 2008, Tentang Pemerintahan Daerah